

Perempuan Pekerja Migran

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran

Artikel

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi
Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda
Sulistyowati Irianto

Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran:
Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu
Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan
Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong
Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalah Komunitas Subsistensi
terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran
Dominggus Elcid Li

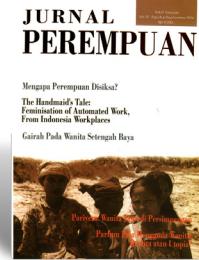
Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo
Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan



Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.

Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroplah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminism. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan mengimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- **Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia**

No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafira Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiantini, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)
Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)
Fransicia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2020

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran/ <i>Women Migrant Workers</i>	iii-iv
<i>Atnike Nova Sigiro</i>	

Artikel

- Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi/*Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption* 135-148
Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo
- Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda/
Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform 149-161
Sulistiyowati Irianto
- Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu/*Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: Case Study in Kenanga Village, Indramayu Regency* 163-176
Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah
- Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong/*Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong* 177-189
Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi
- Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsistens terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran/*Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour* 191-207
Dominggu Elcid Li
- Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo/
Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and 'Desmigratif' Programs in Wonosobo District 209-219
Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian

JP 106 Perempuan Pekerja Migran diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan bersama Migrant CARE dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Pandangan dalam artikel ini merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Perempuan Pekerja Migran *Women Migrant Workers*

Berdasarkan data *World Migration Report* 2020, Indonesia merupakan satu dari 10 besar negara di Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya. Remitansi yang diperoleh dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2017 mencapai US \$ 8,78 miliar, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi US \$ 10,97 miliar – atau setara dengan 6,91 persen pendapatan APBN 2019. Meningkatnya remitansi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah PMI sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, di mana proporsi pertumbuhan pekerja migran perempuan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. Pada tahun 2019, BP2MI mencatat jumlah penempatan PMI sebanyak 276.553 orang, dan dari jumlah tersebut 191.237 orang adalah perempuan. Maka dapat diperkirakan bahwa pekerja migran perempuan merupakan penyumbang remitansi terbesar.

Salah satu konsep yang muncul dalam studi feminism terkait migrasi dan pekerja migran adalah konsep ‘feminisasi migrasi’ (*feminization of migration*). Feminisasi migrasi dapat dilihat sebagai gejala meningkatnya jumlah migrasi perempuan, khususnya arus migrasi di beberapa kawasan, misalnya arus perempuan pekerja migran dari negara-negara berkembang di Asia seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina ke negara-negara seperti Korea, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah. Feminisasi migrasi juga dapat dilihat dari meningkatnya permintaan akan jenis pekerjaan ‘feminin’ – atau jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh, termasuk juga pekerja seks.

Konsep feminisasi migrasi penting untuk mengungkapkan pola migrasi yang tergenderisasi. Konsep feminisasi migrasi mengungkapkan peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja, dan sebagai penyumbang penting bagi pengentasan kemiskinan melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di kampung halamannya. Konsep yang sama juga dapat mengungkapkan bahwa arus migrasi perempuan telah melanggengkan subordinasi terhadap kerja-kerja domestik, seperti kerja pengasuhan (*care work*) sebagai jenis pekerjaan khas perempuan, pekerjaan rendah, karena dianggap tidak membutuhkan keterampilan. Akibatnya, perempuan pekerja migran pun rentan terhadap eksloitasi dan kekerasan yang terjadi di ranah domestik di negara-

negara penerima, dan juga subordinat dalam kebijakan-kebijakan negara.

Eksloitasi dan kekerasan oleh majikan, maupun penipuan oleh agen pemberi kerja, masih merupakan persoalan-persoalan klasik yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran. Di negara tujuan pekerja migran yang tidak memiliki aturan yang baik dalam hal ketenagakerjaan, hak-hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak memiliki penegakan hukum terhadap agen tenaga kerja yang melakukan eksloitasi, maka perempuan pekerja migran akan rentan terhadap kekerasan dan eksloitasi. Kasus-kasus seperti paspor ditahan oleh majikan, visa kerja bermasalah, pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, merupakan beberapa persoalan yang kerap menyebabkan pekerja migran dianggap sebagai pekerja ilegal (*illegal migrant worker*). Status semacam ini membuat pekerja migran kerap kehilangan haknya sebagai subjek hukum.

Kejahatan lintas negara (*trans-national crime*) dan kejahatan internasional terorganisir (*international organized-crime*) juga mengancam perempuan pekerja migran. Beberapa kasus perdagangan manusia, dan kurir narkotika sesungguhnya memperlihatkan kerentanan perempuan pekerja migran terhadap kejahatan lintas negara. Tak hanya itu, fenomena mengejutkan muncul dalam temuan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) akan adanya paparan ideologi ekstremisme kekerasan atas nama agama terhadap komunitas perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Fenomena keterlibatan perempuan pekerja migran dalam berbagai kejahatan internasional ini akan semakin menyudutkan posisi perempuan pekerja migran yang telah tersubordinasi, menjadi rentan terhadap stigma negatif. Oleh sebab itu, upaya mitigasi ancaman kejahatan internasional terhadap perempuan pekerja migran perlu didorong dalam kerangka pencegahan dan perlindungan, bukan semata-mata dalam kerangka pemidanaan dan stigma terhadap perempuan pekerja migran.

Pelindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab negara, baik negara pengirim maupun negara penerima. Maka diskursus pekerja migran juga menjadi isu penting dalam hubungan dan kerjasama internasional. Salah satu konsep yang berkembang di tingkat global adalah konsep migrasi aman (*safe migration*). Migrasi aman adalah prosedur migrasi yang aman bagi pekerja

migran untuk mereduksi kerentanan, serta memperkuat akses pelindungan dan hak pekerja migran. Konsep ini telah disepakati oleh komunitas internasional dan dituangkan dalam Konvensi PBB No. 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Sebagai salah satu negara pihak dari Konvensi 1990 ini, Indonesia berkewajiban untuk menerjemahkan upaya perlindungan pekerja migran melalui pembentukan aturan perundang-undangan, kebijakan, serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik di tingkat nasional, daerah, maupun dalam perjanjian bilateral maupun multilateral terkait migrasi tenaga kerja.

Kemajuan dalam upaya perlindungan PMI tampak dengan disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI tahun 2017 dinilai telah membawa kerangka normatif yang positif terhadap perlindungan pekerja migran, khususnya jika dibandingkan dengan UU terdahulu yang sangat berorientasi bisnis. Namun UU PPMI tahun 2017 dinilai masih belum memasukkan dimensi gender yang dibutuhkan agar perlindungan PMI juga responsif terhadap persoalan perempuan pekerja migran.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, banyak perempuan pekerja migran harus terus hidup dalam siklus migrasi hingga fisik atau kondisi sosial (misalnya

menikah, memiliki anak, orang tua sakit) mengharuskan mereka berhenti menjadi pekerja migran. Ketika menjadi seorang purna pekerja migran, mereka tetap akan menghadapi persoalan kemiskinan struktural di pedesaan. Perhatian terhadap situasi perempuan purna migran semestinya juga mendapatkan perhatian lebih, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Program 'Desa Peduli Buruh Migran' (Desbumi) yang dikembangkan oleh Migrant CARE dan 'Desa Migran Produktif' (Desmigratif) yang dikembangkan pemerintah, merupakan inisiatif program yang penting bagi perempuan purna pekerja migran, dengan mengintegrasikan upaya pemberdayaan perempuan purna migran dengan masyarakat desa atau kampung halaman mereka. Salah satu akar dari arus pekerja migran adalah kemiskinan di pedesaan, maka masa depan perempuan purna pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Jurnal Perempuan edisi Perempuan Pekerja Migran mengangkat beberapa kajian terkait diskursus dan situasi perempuan pekerja migran di Indonesia. Tanpa lensa gender maka akan sulit untuk merumuskan perlindungan perempuan pekerja migran melalui kebijakan maupun program-program perlindungan dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran. Pemahaman kritis mengenai feminisasi migrasi juga penting untuk membangun kesadaran publik tentang keberadaan dan kerentanan yang dihadapi oleh para pahlawan devisa ini. Selamat membaca! **(Atnike Nova Sigiro)**

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Yovi Arista,Zulyani Evi, Wahyu Susilo
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi

Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 135-148, 3 gambar, 3 tabel, 32 daftar pustaka

Women migrant workers have a significant role and contribution in driving migration, economy, and global development. Behind the remittance flows, women migrant workers are still overshadowed by the threats of various problems. The dimensions of the problems faced are increasingly complex as the depletion of mobility limits between countries, the increasing of securitization policy as well as the rapid progress of global development in social, economic, and political aspects. Through the literature review, this article intends to highlight the vulnerability of Indonesian women migrant workers from the perspective of migration and governance from a feminist perspective. The results of the review show that women migrant workers are still facing multidimensional vulnerability. This includes the actual conditions of women migrant workers facing injustice, violations of rights, affected by disruption of information-technology, and being center in the pandemic crisis. This condition also leads to the structural aspects related to protection's policy and institutional issues that are not sensitive to the interests and the root of problems faced by women migrant workers.

Keywords: women, migration, migrant workers, women migrant worker.

Perempuan pekerja migran memiliki peranan dan kontribusi yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan global. Di balik aliran remitansi yang dikontribusikan, perempuan pekerja migran masih terus dibayangi ancaman atas beragam permasalahan. Dimensi permasalahan yang dihadapi semakin kompleks seiring menipisnya batasan mobilitas antar negara namun juga menguatnya sekuritisasi perbatasan, serta perkembangan pesat geliat sosial, ekonomi dan politik global. Melalui tinjauan kepustakaan, artikel ini bermaksud untuk menyoroti kerentanan perempuan pekerja migran dari Indonesia dalam kacamata kebijakan dan tata kelola migrasi dengan perspektif feminis. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa perempuan pekerja migran masih menghadapi kerentanan multi-dimensi. Di dalamnya termasuk kondisi-kondisi aktual perempuan pekerja migran menghadapi ketidakadilan, pelanggaran hak, terdampak disrupsi teknologi informasi, hingga berada dalam pusaran kecamuk krisis pandemi. Kondisi ini juga bermuara pada aspek struktural terkait persoalan kebijakan dan kelembagaan perlindungan yang tidak sensitif pada kepentingan dan akar permasalahan yang dihadapi perempuan pekerja migran.

Kata kunci: perempuan, migrasi, pekerja migran, perempuan pekerja migran.

Sulistiyowati Irianto
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok)

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda

*Protection for Women Migrant Workers:
The Delaying Legal Reform*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 149-161, 14 daftar pustaka

Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lens of Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regards to the protection of female workers; if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems from what was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one of the most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation, and solutions to develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreign lands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection.

Keywords: Feminist jurisprudence, migrants workers, gender justice, law literacy.

Suatu terobosan dalam bidang perlindungan pekerja migran, sebagian besarnya perempuan, dapat ditemukan dalam UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini lahir 13 tahun kemudian menggantikan UU No. 39/2004, yang menurut banyak kajian dan dalam praktiknya menyebabkan banyak persoalan. UU baru ini tampak bersifat progresif, telah banyak mengakomodir pengalaman dan realitas pekerja migran. Namun ketika diperlakukan dengan pendekatan Yurisprudensi Feminis, dan menyandangkannya dengan berbagai pasal dari berbagai instrumen hukum lain yang berperspektif keadilan gender, maka tampak adanya ruang-ruang kosong yang tidak spesifik menyebut perlindungan bagi perempuan. Ruang kosong itu bisa tidak segera diisi dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya, akan kurang maksimal dalam memberi perlindungan bagi pekerja migran perempuan. Temuan penelitian lapangan di tiga wilayah (Sukabumi, Lampung dan Jakarta) menunjukkan bahwa literasi hukum yang meliputi pengetahuan tentang UU baru ini belum terbangun. Di sinilah letaknya tantangan baru bagi implementasi UU ini ke depan.

Kata kunci: Yurisprudensi Feminis, pekerja migran, keadilan gender, literasi hukum

¹Andi Misbahul Pratiwi, ²Yusmiati Vistamika Wangka,
²Andi Nur Faizah

(¹Jurnal Perempuan & ²Program Studi Kajian Gender
Universitas Indonesia, Jakarta)

Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu

*Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee
Women Migrant Workers: A Case Study in Kenanga Village,
Indramayu District*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 163-176, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Indonesia is one of the countries of origin for migrant workers in the world. In the context of migration, the discourse on natural resources, sustainable economy, and women's empowerment are not the mainstream discussion. The resilience or economic sustainability of returnee women migrant workers (RWMWs) is also a major problem in migration policy schemes and practices in Indonesia. This paper explores how the model of economic empowerment in Kenanga Village, Indramayu District, as a local initiative can bring welfare toward RWMWs and goes beyond the discourse of safe migration. The data in this research analyzed using Harvard and Longwee' gender analysis tools as well as indicator of gender mainstreaming, and Naila Kabeer's theory of empowerment. This paper finds that local initiatives of productive economy have a positive impact on the economic sustainability of RWMWs in Kenanga Village. It is important to develop economic resilience as an alternative to alleviate poverty. However, in the empowerment program, it is important to consider various aspects of gender justice.

Keywords: returnee women migrant workers (RWMWs), women's economic empowerment, Kabupaten Indramayu, gender analysis.

Indonesia merupakan salah satu negara asal pekerja migran di dunia. Dalam konteks migrasi, diskursus mengenai sumber daya alam, ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan tidak menjadi perbincangan arus utama. Ketahanan atau keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran juga masih menjadi masalah utama dalam skema kebijakan dan praktik migrasi di Indonesia. Tulisan ini menggali bagaimana model pemberdayaan ekonomi di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, sebagai sebuah inisiatif lokal dapat menghadirkan kesejahteraan bagi perempuan purna pekerja migran dan melampaui diskursus migrasi aman. Data dalam penelitian ini dianalisa dengan alat analisa gender yakni Harvard, Longwee, dan indikator pengarusutamaan gender, dan teori pemberdayaan dari Naila Kabeer. Tulisan ini menemukan bahwa inisiatif lokal ekonomi produktif membawa dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran di Desa Kenanga. Ketahanan ekonomi di daerah asal menjadi penting untuk dibangun sebagai salah satu jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, dalam setiap program pemberdayaan penting untuk memperhatikan aspek keadilan gender.

Kata Kunci: perempuan purna pekerja migran, pemberdayaan ekonomi perempuan, Kabupaten Indramayu, analisa gender.

Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 177-189, 1 tabel, 23 daftar pustaka

This qualitative study analyzes the involvement of female perpetrators of extreme violence acts and suicide bombings against the modern state as a symbol of their religious enemies. The topic is crucial as it shows the meaningful reasons for female militancy, where women are seen to exceed their gender norms. It is not because they take their own lives but also to bring their children to embrace death in the process of religious-based violent extremism. This article opposes the idea of gender in binary opposition as female and male, but rather see it as a range of gender spectrum. The understanding of the main symbolic structures here is crucial as it is capable of dismantling aspects that temporarily limit gender roles. At the same time, what they are doing is constructing new ideas that "God do not see you in someone appearance" included their gender, but rather their "action". It is their way to find justification to support extreme violence, although it is against religious teaching.

Keywords: gender, violent extremism, faith, ideology.

Studi kualitatif ini menganalisis keterlibatan perempuan pelaku aksi kekerasan ekstrem dan bom bunuh diri terhadap negara modern sebagai simbol dari musuh agama mereka. Topik ini krusial karena menunjukkan makna dibalik militansi perempuan, dimana perempuan terlihat melampaui norma gender mereka. Bukan karena mereka mengakhiri nyawa mereka sendiri, tapi karena mereka juga membawa serta anak-anak mereka untuk menyambut kematian dalam proses kekerasan ekstrem berbasis agama. Artikel ini menentang gagasan gender dalam oposisi biner sebagai perempuan dan laki-laki, tetapi lebih melihatnya sebagai rentang spektrum gender. Pemahaman tentang struktur utama simbolik di sini sangat penting karena mampu membongkar aspek-aspek yang untuk sementara waktu membatasi peran gender dalam pengertian oposisi biner. Pada saat yang sama, yang mereka lakukan adalah membangun ide-ide baru bahwa "Tuhan tidak melihat Anda dalam penampilan seseorang" termasuk gendernya, melainkan "tindakannya". Ini adalah cara mereka menemukan pembernanar untuk mendukung kekerasan ekstrem, meskipun bertengangan dengan ajaran agama.

Kata Kunci: gender, ekstremisme kekerasan, kepercayaan, ideologi.

Domingus Elcid Li
(Institute of Resource Governance and Social Change,
Nusa Tenggara Timur)

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsistens terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran

Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 191-207, 2 grafik, 4 gambar, 6 tabel, 20 daftar pustaka

The analytical view explorers in this paper represent the perspective of subsistent farmers in NTT Province when integrated with market economy. It tries to explain why the subsistent community are so vulnerable to become migrant workers and uprooted from their land; it is also attempt to investigate the relation between economic policy on free labour market with death and torture received by migrant workers. While the victims, especially women and children, are publicized and attracted attention from mass media and also social media. However, the publication over the suffering of migrant workers from the margin of Indonesia such as NTT Province, does not get direct impact over the policy makers with the willingness to renew regulation to protect migrant workers. This paper focuses on investigating why the poor migrant women and children are being neglected by policy makers under the neoliberal order. It also tries to explain why the subsistent members are easily uprooted from their land and become migrant workers during modernization. It also tries to answer why they are often in position as the losers or victims during globalization. The hope that the State is able to protect the vulnerables is fading away under the domination of pro market policy. Children and women as the silent victims are the evidence of absolute surrender of the subsistent community. State incapacity to protect the most vulnerable citizens is the evidence of the coming of new wave of neocolonialism. This is also a proof the modernization is also part of conquering when half-hearted modernization has placed them at the bottom of the pyramid of modernity which is vulnerable to be exploited without the ability to speak and to be listened.

Keywords: human trafficking, trafficking of women, trafficking of girl, migrant labour, east nusa tenggara.

Kajian perdagangan orang dalam tulisan ini dibahas dalam perspektif kekalahan para petani subsisten di Nusa Tenggara Timur ketika terintegrasi dalam ekonomi pasar. Tulisan berusaha menjelaskan mengapa kaum subsisten dengan mudah beralih menjadi buruh

migran dan tercerabut dari tanahnya seiring gelombang modernisasi, dan juga berupaya menggali hubungan antara pasar bebas tenaga kerja dengan kematian dan siksaan yang mereka terima. Meskipun penderitaan anak dan perempuan buruh migran miskin dari NTT mendapat publikasi luas, penderitaan mereka cenderung diabaikan oleh para pembuat kebijakan di era neoliberal. Harapan bahwa negara akan mampu melindungi warga negara yang lemah semakin menjauh karena dominasi pikiran pro pasar tanpa regulasi dan proteksi pada tenaga kerja. Anak-anak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang merupakan bukti kekalahan mutlak komunitas-komunitas subsisten. Ketiadaan perlindungan terhadap warga negara yang paling rentan merupakan kekalahan negara terhadap gelombang pasang neokolonialisme. Ini juga menjadi bukti bahwa modernisasi yang dijalankan dengan setengah hati menjadi bagian dari penaklukan terhadap komunitas subsisten dan meletakkan mereka di dasar piramida modernitas yang rentan dieksplorasi tanpa mampu bersuara dan didengarkan.

Kata Kunci: perdagangan manusia, perdagangan perempuan, perdagangan anak perempuan, buruh migran, nusa tenggara timur.

Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo

Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and 'Desmigratif' Programs in Wonosobo District

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 209-219, 10 daftar pustaka

Ex-migrant workers are often found dealing with the lack of union that could cater their needs. These people that are mostly female are often excluded from the process of decision making in their own villages. In 2013, a program from civil society organization called Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran* or Migrant Workers Care Village) Initiative was launched in Wonosobo District, with the aim to improve migrant workers' living conditions - especially female - through empowering female ex-migrant workers group. In 2016, a similar program called Desmigratif (*Desa Migran Produktif* or Productive Migrants Village) Initiative was spearheaded by the Ministry of Manpower, which shares

the same goal with Desbumi Initiative. Building upon the debates surrounding the concept of sisterhood provided by Bell Hooks and Robin Morgan, this study discusses whether the top-down approach in organizing female ex-migrant workers residing in Kuripan, Lipursari, Rogojati, and Sindupaten Village through Desbumi and Desmigratif initiative could result in any forms of sisterhood formed during the implementation of the programs, and challenges that they faced along the way. This study found that characteristics associated with sisterhood of friendships were apparent in all female ex-migrant groups, signified by mutual support among women, shared experience, journey of self-discovery, and collective identity built upon similarities. On the discussion of challenges, several obstacles such as lack of regeneration, women's domestic burden, and the issue of sustainability appeared along the journey of the sisterhood of ex-migrant workers.

Keywords: Ex-migrant workers, migrant workers, migrant village, rural women, sisterhood.

Purna Migran kerap mengalami kesulitan dalam mencari kelompok yang mampu memfasilitasi kebutuhan mereka. Purna migran - yang umumnya adalah perempuan - seringkali tereksklusi dari proses pengambilan keputusan di desanya masing-masing. Pada tahun 2013, program Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran) diinisiasi di Kabupaten Wonosobo oleh organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan memperbaiki kondisi pekerja migran melalui pemberdayaan komunitas perempuan purna migran. Pada tahun 2016, Kementerian Ketenagakerjaan menginisiasi program Desmigratif (Desa Migran Produktif) dengan tujuan program yang relatif sama dengan Desbumi. Berangkat dari pembahasan terkait konsep persaudarian yang disajikan oleh Bell Hooks dan Robin Morgan, studi ini membahas tentang bagaimana pendekatan *top-down* dalam pengorganisasian kelompok perempuan purna migran di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten melalui program Desbumi dan Desmigratif mampu melahirkan bentuk-bentuk persaudarian, serta tantangan yang dihadapi oleh persaudarian sepanjang perjalanan mereka. Studi ini menemukan bahwa karakteristik yang identik dengan *sisterhood of friendships* seperti dukungan antar-perempuan, pengalaman bersama, perjalanan mencari jati diri, dan kelahiran identitas kolektif muncul di dalam kelompok-kelompok purna migran perempuan di keempat desa. Terkait tantangan yang dihadapi persaudarian, kesulitan regenerasi, beban domestik perempuan, serta isu keberlanjutan menjadi tantangan yang harus dihadapi persaudarian purna migran.

Kata Kunci: Purna migran, pekerja migran, desa migran, perempuan pedesaan, persaudarian.

Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo

*Ex-Migrant Workers' Sisterhood:
Case Study on 'Desbumi' and 'Desmigratif' Programs in Wonosobo District*

¹Zulyani Evi, ²Yovi Arista, ³Safina Maulida, ⁴Arief Rahadian

Migrant CARE

Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

Jl. Jatipadang I No. 5A, Jatipadang-Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12540

¹evi@migrantcare.net, ²yovi@migrantcare.net, ³safinamaulida@gmail.com, ⁴rahadianmu@gmail.com

Kronologi Naskah: Diterima 6 Agustus 2020, direvisi 10 Agustus 2020, diputuskan diterima 21 Agustus 2020

Abstract

Ex-migrant workers are often found dealing with the lack of union that could cater their needs. These people that are mostly female are often excluded from the process of decision making in their own villages. In 2013, a program from civil society organization called Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran* or Migrant Workers Care Village) Initiative was launched in Wonosobo District, with the aim to improve migrant workers' living conditions - especially female - through empowering female ex-migrant workers group. In 2016, a similar program called Desmigratif (*Desa Migran Produktif* or Productive Migrants Village) Initiative was spearheaded by the Ministry of Manpower, which shares the same goal with Desbumi Initiative. Building upon the debates surrounding the concept of sisterhood provided by Bell Hooks and Robin Morgan, this study discusses whether the top-down approach in organizing female ex-migrant workers residing in Kuripan, Lipursari, Rogojati, and Sindupaten Village through Desbumi and Desmigratif initiative could result in any forms of sisterhood formed during the implementation of the programs, and challenges that they faced along the way. This study found that characteristics associated with sisterhood of friendships were apparent in all female ex-migrant groups, signified by mutual support among women, shared experience, journey of self-discovery, and collective identity built upon similarities. On the discussion of challenges, several obstacles such as lack of regeneration, women's domestic burden, and the issue of sustainability appeared along the journey of the sisterhood of ex-migrant workers.

Keywords: Ex-migrant workers, migrant workers, migrant village, rural women, sisterhood.

Abstrak

Purna Migran kerap mengalami kesulitan dalam mencari kelompok yang mampu memfasilitasi kebutuhan mereka. Purna migran - yang umumnya adalah perempuan - seringkali tereksklusi dari proses pengambilan keputusan di desanya masing-masing. Pada tahun 2013, program Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran* atau Migrant Workers Care Village) diinisiasi di Kabupaten Wonosobo oleh organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan memperbaiki kondisi pekerja migran melalui pemberdayaan komunitas perempuan purna migran. Pada tahun 2016, Kementerian Ketenagakerjaan menginisiasi program Desmigratif (*Desa Migran Produktif*) dengan tujuan program yang relatif sama dengan Desbumi. Berangkat dari pembahasan terkait konsep persaudarian yang disajikan oleh Bell Hooks dan Robin Morgan, studi ini membahas tentang bagaimana pendekatan *top-down* dalam pengorganisasian kelompok perempuan purna migran di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten melalui program Desbumi dan Desmigratif mampu melahirkan bentuk-bentuk persaudarian, serta tantangan yang dihadapi oleh persaudarian sepanjang perjalanan mereka. Studi ini menemukan bahwa karakteristik yang identik dengan *sisterhood of friendships* seperti dukungan antar-perempuan, pengalaman bersama, perjalanan mencari jati diri, dan kelahiran identitas kolektif muncul di dalam kelompok-kelompok purna migran perempuan di keempat desa. Terkait tantangan yang dihadapi persaudarian, kesulitan regenerasi, beban domestik perempuan, serta isu keberlanjutan menjadi tantangan yang harus dihadapi persaudarian purna migran.

Kata Kunci: purna migran, pekerja migran, desa migran, perempuan pedesaan, persaudarian.

Pendahuluan

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah basis Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Tengah. Dengan angka pertumbuhan migrasi tenaga kerja sebesar tujuh persen tiap tahunnya sejak tahun 2015-2017, mayoritas pekerja migran asal Wonosobo bermigrasi dan

mengisi pasar tenaga kerja di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Taiwan, Hong Kong, Malaysia dan Singapura (BPS Kabupaten Wonosobo 2019). Dalam pendokumentasian Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo, pekerja migran yang ditempatkan setiap tahunnya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo dan sebagian besar berasal dari

wilayah pedesaan. Pekerja migran yang mayoritas adalah perempuan menjadikan kerja bermigrasi sebagai strategi untuk menyelamatkan kondisi ekonomi keluarga di desa (Wulan 2009).

Pada tahun 2016, Migrant CARE melakukan survei di tujuh desa basis pekerja migran di Kabupaten Wonosobo, dengan komposisi responden 98% purna migran, dan 2% keluarga buruh migran. Dari total 342 responden, 96% adalah perempuan dan 4% adalah laki-laki. Survei ini menemukan bahwa 50% purna migran pernah bermigrasi sebanyak satu kali; 32% responden pernah bermigrasi sebanyak dua kali; dan 14% sudah bermigrasi sebanyak empat kali. Temuan lain yang cukup menarik adalah hanya 26% responden yang mengaku pernah terlibat dalam aktivitas paguyuban kedaerahan dan majelis taklim saat berada di luar negeri, sisanya (74%) tidak berorganisasi dan tidak mengetahui keberadaan serikat buruh di negara tempat mereka bekerja (Survei Desbumi 2016).

Minimnya keterlibatan purna migran - khususnya perempuan purna migran-dalam aktivitas keorganisasian juga terjadi ketika mereka kembali ke daerah asalnya. Selain inisiatif di tataran individu atau keluarga, para perempuan purna migran tidak memiliki wadah kolektif untuk berorganisasi ataupun mengembangkan kemampuannya dalam mengelola remitansi (sebagian besar remitansi digunakan untuk biaya hidup keluarga di desa, pendidikan anak, dan membangun rumah). Banyak dari mereka yang kemudian terjebak dengan siklus migrasi berulang karena tidak dapat keluar dari rantai kemiskinan. Dalam konteks perempuan purna migran, institusi pemerintahan desa hanya dilihat sebagai prasyarat pemenuhan dokumen kependudukan atau izin berangkat ke luar negeri. Beberapa di antara mereka bahkan tidak pernah menyambangi Kantor Desa sama sekali.

Lebih lanjut, organisasi perempuan di daerah relatif didominasi oleh kelompok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan Posyandu (Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu), yang tidak dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan purna migran secara khusus. Gerakan PKK, sebagai organisasi perempuan di akar rumput yang telah terlembaga sejak tahun 1961, merupakan artefak politik khas Orde Baru yang identik dengan upaya pengarahan dan pengontrolan perempuan dengan berlandaskan kepentingan pembangunan. Perubahan paradigma dari "pembinaan" ke "pemberdayaan" ternyata tidak memberikan perbedaan yang substantif dalam merespons tantangan baru yang hadir bersamaan

dengan reformasi dan liberalisasi ekonomi (Martiany 2015). Hal ini tentu tidak sejalan dengan kepentingan perempuan purna migran yang membutuhkan wadah untuk berorganisasi dan mengembangkan diri mereka.

Sebagai inisiatif masyarakat sipil untuk memaksimalkan ruang dan potensi perempuan purna migran untuk berorganisasi dan mengembangkan diri, sejak tahun 2013 Migrant CARE bersama Social Analyst and Research Institute (SARI) Solo berupaya mengembangkan program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu wilayah basis pekerja migran. Melalui pendekatan multipihak, Desbumi bertujuan untuk memperbaiki kondisi migrasi pekerja migran (khususnya perempuan) yang bekerja ke luar negeri dengan merekonstruksi tata kelola pemerintahan desa dan pola pemberdayaan komunitas perempuan purna migran.

Kehadiran Desbumi kemudian memancing munculnya inisiatif-inisiatif berbasis komunitas dan desa lain dengan tujuan yang relatif serupa: advokasi kepentingan pekerja migran dengan melibatkan perempuan purna migran sebagai penggerak utamanya. Tidak hanya itu, pemerintah juga berinisiatif untuk menggagas program serupa pada tahun 2016, melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program yang diberi nama Desa Migran Produktif (Desmigratif) ini menjadikan Desa Kuripan di Kabupaten Wonosobo sebagai wilayah rintisan. Melihat kesamaan lokus, tujuan, dan penerima manfaat program, upaya untuk mensinergikan inisiatif Desbumi dan Desmigratif mulai dilakukan pada tahun 2016, dengan desa Kuripan sebagai wilayah rintisan. Pada tahun-tahun berikutnya, integrasi dilakukan secara bertahap hingga saat ini tersebar di empat titik di Kabupaten Wonosobo.

Program Desbumi memiliki tiga pilar yang mencakup pendataan dan diseminasi, pembangunan institusi, dan pemberdayaan pekerja migran dan anggota keluarganya (Hidayah 2016). Ketiga pilar itu diterjemahkan dalam tujuh layanan: pendataan mobilitas pekerja migran, penyusunan Peraturan Desa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pengurusan dokumen, informasi migrasi aman, pengaduan kasus, dan sosialisasi. Sedangkan Desmigratif memiliki empat pilar yakni migrasi aman (IPK Online dan bimbingan kerja), usaha produktif (pelatihan, bantuan Sarana, pendampingan, pemasaran), *community parenting* (pelatihan mengasuh anak, layanan konseling, taman baca dan rumah belajar untuk anak-anak pekerja migran Indonesia/PMI). Pilar-pilar tersebut saling melengkapi dan memperkokoh kapasitas kelompok purna migran perempuan di masing-masing desa.

Keberadaan program Desbumi dan Desmigratif menjadi relevan dengan kondisi pembangunan desa yang rentan memungkirkkan partisipasi dan peranan perempuan purna migran. Meninjau intervensi dari program-program pengorganisasian dan pemberdayaan kelompok perempuan purna migran, menarik untuk melihat apakah program yang diinisiasi oleh masyarakat sipil dan pemerintah mampu memunculkan persaudarian¹ perempuan purna migran di tataran akar rumput. Evans (2015) mendefinisikan persaudarian atau *sisterhood* sebagai cermin kesadaran kolektif antar-perempuan, sekaligus manifestasi solidaritas gerakan perempuan (Evans 2015, h. 111). Dalam konteks ini, persaudarian purna migran dapat dilihat dari bagaimana perempuan purna migran di wilayah basis pekerja migran mampu mengartikulasikan kesadaran kolektif mereka, serta melakukan gerakan-gerakan politik sebagai manifestasi solidaritas perempuan.

Artikel ini akan membahas tentang kondisi kelompok perempuan purna migran di empat desa basis pekerja migran, tinjauan teoretis tentang konsep persaudarian, serta bahasan terkait relevansi konsep persaudarian dengan kondisi kelompok perempuan purna migran di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten dalam kerangka program Desbumi dan Desmigratif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus utama pengalaman purna migran dalam membangun persaudarian (*sisterhood*) perempuan di desa Sindupaten, Rogojati, Kuripan, dan Lipursari - empat desa di Kabupaten Wonosobo yang menjalankan program Desbumi dan Desmigratif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, diskusi terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dan studi pustaka. Proses pengumpulan data kualitatif dilakukan oleh tim peneliti lapangan yang memiliki pengalaman sebagai purna migran perempuan. Peneliti lapangan melibatkan berbagai aktor dan pemangku kebijakan terkait; yang terdiri dari unsur pemerintah desa, purna migran perempuan dan anggota keluarganya, pemerintah daerah, serta perwakilan sektor privat; sebagai informan dalam proses wawancara dan diskusi terfokus.

Sepanjang proses penelitian, tim peneliti melakukan wawancara terhadap 51 informan yang terdiri dari 16 orang anggota kelompok perempuan purna migran, 10 orang pengurus layanan Desbumi, 4 orang petugas Desmigratif, 16 orang unsur pemerintah desa (kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa/BPD), 4 orang unsur pemerintah daerah (Dinas

Tenaga Kerja serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo), dan 1 orang perwakilan dari pelaksana program Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Desmigratif. Diskusi terfokus dilakukan bersama 10 informan yang merupakan perwakilan kelompok dan pengurus Desbumi, pemerintah desa, dan petugas Desmigratif di 4 desa fokus penelitian. Lebih lanjut, diskusi terfokus juga dilakukan bersama 12 peneliti lapangan yang memiliki pengalaman hidup sebagai purna migran perempuan, untuk memperdalam pemahaman terkait konteks penelitian, dan sebagai bahan refleksi bersama.

Data deskriptif terkait situasi di wilayah penelitian --khususnya terkait kehidupan purna migran perempuan-- dikumpulkan melalui proses observasi yang dilakukan oleh peneliti lapangan selama tinggal dan melakukan penelitian di keempat desa yang menjadi situs penelitian; sedangkan studi pustaka terhadap artikel akademis dan dokumen-dokumen pendukung lain--seperti konvensi internasional, naskah undang-undang, dan peraturan-peraturan sejenis--dilakukan untuk memperkaya pemahaman terkait konteks, serta membangun kerangka teori dalam membahas kondisi perempuan purna migran secara umum, dan permasalahan persaudarian perempuan purna migran secara khusus.

Menyoal Konsep Persaudarian (*Sisterhood*)

Persaudarian dapat dimaknai sebagai cermin kesadaran kolektif antar perempuan, sekaligus manifestasi solidaritas gerakan perempuan (Evans 2015, h. 111). Namun dalam diskursus feminism, diskusi terkait konsep ini memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Pembahasan mengenai konsep *sisterhood* atau persaudarian umumnya muncul dalam literatur feminis multikultural-global, khususnya ketika mengupas perbedaan dan persamaan antar-perempuan - dan bagaimana dalam jaring-jaring perbedaan dan kesamaan tersebut, perempuan sebenarnya saling terhubung antara satu dengan lainnya (Tong 2009, h. 217). Dalam perkembangan literatur feminis, konsep persaudarian dapat dibagi ke dalam dua lokus pemikiran berbeda: 1) *Sisterhood of friendship* atau persaudarian sebagai ekspresi persahabatan; dan 2) *Sisterhood of political solidarity* atau persaudarian sebagai solidaritas politik (Tong 2009, h. 236).

Memaknai persaudarian sebagai ekspresi persahabatan berangkat dari memahami perempuan (jamak) sebagai entitas yang tidak jauh berbeda, antara satu dengan lainnya. Robin Morgan dalam *Sisterhood is Global* (1984) menjelaskan bahwa perempuan

memiliki kesamaan mendasar antara satu dengan yang lainnya (Morgan dalam Tong 2009, h. 223). Membuka ruang perjumpaan dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk "mempertanyakan perbedaan" secara terbuka akan membawa mereka pada sebuah kesadaran: bahwa perempuan sama-sama berada dalam proses pencarian jati diri (*self*) "*artikulasi kedirian, kemampuan untuk mewujud, citra diri, dan hak untuk menjadi diri sendiri*" (Morgan dalam Tong 2009, h. 233).

Dalam konteks ini, persaudarian menjadi wadah bagi perempuan untuk sama-sama menemukan jati diri masing-masing dan berbagi pengalaman. Spelman (dalam Tong 2009) menjelaskan secara lebih lanjut bahwa dalam ikatan persaudarian, perempuan harus mampu berempati dan membayangkan kehidupan saudarinya, serta membuka diri pada pendapat-pendapat perempuan lain. *Sisterhood of friendship* mengandaikan persaudarian perempuan sebagai wadah, atau tempat perempuan untuk saling mendukung antar sesama, dengan menggunakan kesamaan pengalaman sebagai pemersatu, di tengah perbedaan masing-masing insan; seperti yang diutarakan oleh Maria Lugones, bahwa satunya hal yang dapat mengikat perempuan dalam sebuah persaudarian adalah keinginan untuk berteman dengan perempuan lain (Lugones dalam Tong 2009, h. 235).

Memaknai persaudarian sebagai solidaritas politik berarti melihat persaudarian sebagai sebuah aksi politik - yang hanya dapat dicapai apabila perempuan mau membenturkan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki dan bergumul dalam kemarahan (Tong 2009, h.235). Perspektif ini memandang perbedaan antar-perempuan sebagai kondisi inheren yang tidak seharusnya dinihilkan; bahwa persaudarian dapat tercapai dengan menonjolkan perbedaan dan keunikan pengalaman masing-masing perempuan, dengan mendorong perempuan untuk berkonfrontasi dan bertarung dengan sesamanya. Sebagai sebuah solidaritas politik, persaudarian tidak dapat didefinisikan sebagai agregat yang diikat oleh kesamaan nasib - kesamaan kondisi sebagai korban dan/atau kesamaan atas pengalaman penindasan; persaudarian harus didefinisikan sebagai agregat yang diikat oleh kesamaan komitmen: komitmen untuk mengakhiri opresi berbasis jenis kelamin, tanpa menihilkan perbedaan mereka masing-masing (Hooks 1984, h.47).

Feminis seperti Bell Hooks dan Audre Lorde memandang konsep *sisterhood of friendship* sebagai sesuatu yang terlewat sentimental dan lahir dari benak perempuan "borjuis kulit putih" (Tong 2009, h.235).

Sisterhood of friendship digambarkan sebagai ruang semu bagi perempuan untuk mendukung perempuan lain tanpa mengkritisi permasalahan internal antar-perempuan yang seharusnya turut dibahas. Lebih lanjut, feminis lain, Irish Young, menyatakan dengan tegas bahwa perbedaan tidak seharusnya dihilangkan untuk mencapai persaudarian. Bagi Young, perempuan tidak harus menjadi 'teman' bagi perempuan lain untuk menjadi bagian dari sebuah persaudarian (Young dalam Tong 2009, h.236).

Perempuan Membantu Perempuan: Persaudarian Purna Migran di Empat Desa Basis Pekerja Migran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelompok purna migran perempuan di empat desa basis pekerja migran: Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten memiliki kualitas persaudarian yang dimanifestasikan dalam kegiatan keorganisasian, serta kehidupan sehari-hari yang relatif tidak terikat dalam skema keorganisasian Desbumi/Desmigratif. Hal ini terlihat dari komitmen kolektif dan pengalaman pemberdayaan yang mereka lakukan.

Komitmen Kolektif terhadap Kelompok Perempuan Purna Migran

Program Desbumi lahir dari inisiatif pihak eksternal - dalam kasus ini, Migrant CARE dan SARI Solo untuk memperbaiki kondisi pekerja migran perempuan melalui advokasi tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan komunitas. Kehadiran program yang bersifat *top-down* membuat angka partisipasi purna migran pada masa-masa awal program relatif rendah.

Pada awal terbentuknya Desbumi masih jarang orang yang tahu dengan Desbumi sehingga kurangnya partisipasi dari pekerja migran. (Fitri, Pengurus Kelompok Bumi Karya Mandiri, Desa Kuripan 2019, wawancara 7 Agustus)

Kendala lain yang turut hadir pada masa-masa awal pengembangan program Desbumi adalah banyaknya anggota kelompok yang berhenti menghadiri kegiatan kelompok dengan berbagai alasan; mulai dari rasa jemu, perasaan kurang mendapatkan manfaat dari kelompok, hingga kesulitan mengelola waktu antara mengurus anak, bertani, dan berorganisasi. Jika pada awalnya jumlah anggota yang bergabung dalam kelompok purna migran bisa mencapai 40-45 orang, dalam rentang waktu satu tahun, hanya setengah dari jumlah anggota tersebut - sekitar 20 hingga 25 orang - yang masih aktif berkegiatan bersama puan purna migran lain.

Awalnya ada 45 orang . . . seiring berjalananya waktu anggotanya mulai berkurang, ada yang merasa jemu. (Sartini, Anggota Kelompok Bumi Sejati, Desa Rogojati 2019, wawancara 31 Juli)

Namun terlepas dari jumlah anggota yang berkurang dan relatif stagnan, kelompok perempuan purna migran mengaku lebih produktif, karena anggota yang bertahan adalah mereka yang betul-betul memiliki komitmen terhadap kelompok.

Bahasan mengenai komitmen juga muncul ketika kelompok perempuan purna migran mendiskusikan struktur kepengurusan dan pembagian kerja dalam kelompok. Meski kelompok perempuan purna migran memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, namun pada praktiknya fungsi-fungsi ini dijalankan secara cair dan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen untuk memajukan kelompok purna migran tidak dibatasi oleh pembagian peran yang kaku.

Saya di sini apa, saya bukan ketua tapi kenapa semua ke saya seperti itu . . . Jadi ya kayak gitu di kelompok itu jadi kalo saya ada berangkat juga. (Sartini, Anggota Kelompok Bumi Sejati, Desa Rogojati 2019, wawancara 31 Juli)

Hal ini menunjukkan bahwa selain diikat oleh komitmen yang sama, kelompok perempuan purna migran juga diikat oleh rasa persahabatan yang dimanifestasikan melalui dukungan anggota kelompok yang selalu mendukung 'ketua' kelompok, dan bagaimana kelompok purna migran perempuan berhasil membuka ruang perjumpaan dengan purna migran lainnya, salah satunya melalui keterlibatan penggerak kelompok purna migran perempuan dalam kegiatan pendataan mobilitas pekerja migran (Survei Desbumi 2017).

Perjumpaan antara enumerator--yang merupakan perempuan purna migran--dengan informan penelitian--yang juga merupakan perempuan purna migran--menjadi titik awal interaksi antar-perempuan purna migran di masing-masing desa lokasi penelitian. Pola-pola hubungan persahabatan seperti yang dijelaskan dalam kutipan wawancara di atas juga turut muncul dalam interaksi antara enumerator dan pekerja migran yang menjadi informan penelitian--bahwa purna migran perempuan relatif terbuka mengikuti kegiatan kelompok, dan proses penjangkauan menjadi kunci untuk mengajak kawan-kawan purna migran yang pada awalnya sudah memiliki modalitas persahabatan ini.

Masih banyak yang belum tahu (Desmigratif) pas saya menyampaikan penjangkauan itu. Tapi setelah saya

penjangkauan, 'oh ya, ada pelatihan' dia antusias untuk ikut pelatihan gitu. (Kiki, Petugas Desmigratif, Desa Rogojati 2019, wawancara 26 November)

Setiap anggota kelompok mengikuti aturan sederhana hasil kesepakatan bersama terkait kontribusi terhadap kas kelompok. Pengelolaan kas kelompok ini kemudian berkembang secara organik menjadi koperasi simpan-pinjam yang diperuntukkan bagi anggota kelompok yang membutuhkan modal usaha, atau biaya hidup yang mendesak (seperti biaya pendidikan anak). Perempuan purna migran juga menyepakati nilai-nilai bersama dalam pengelolaan kas kelompok, seperti prinsip saling menghargai dan tanggung jawab dalam proses pengembalian kas kelompok. Dalam skenario ini, nuansa 'perempuan membantu perempuan' hadir dalam pola-pola hubungan dalam kelompok perempuan purna migran.

Pengalaman Pemberdayaan Perempuan Purna Migran

Selain diikat oleh komitmen untuk memajukan kelompok dan rasa persahabatan, kelompok perempuan purna migran juga diikat oleh pengalaman bersama dalam proses-proses pemberdayaan kelompok. Kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan-pelatihan diakui menjadi perekat kelompok, sekaligus penunjang produktivitas kelompok perempuan purna migran. Identitas kelompok perempuan purna migran di masing-masing desa dibangun berdasarkan bentuk usaha yang mereka geluti.

Bentuk kegiatannya kita sering mengadakan pertemuan dan pelatihan dan setelah itu langsung memproduksi seperti pembuatan batik, kuliner jahe. dipasarkan melalui warung-warung dan dengan sistem online dan nanti hasilnya dibagikan ke kelompok. (Ngarifah, Pengurus Kelompok *Migrant United Wonosobo/MUIWO*, Desa Lipursari 2019, wawancara 5 Agustus)

Di Desa Rogojati, kelompok perempuan purna migran relatif terbagi ke dalam tiga klaster: perajin batik, produsen abon lele, serta produsen makanan ringan. Di desa-desa lain, kelompok perempuan purna migran umumnya terbagi ke dalam kelompok kuliner dan kelompok menjahit/membatik. Di keempat desa yang diteliti, seluruhnya memiliki aktivitas membatik dan masing-masing desa memiliki motif batik yang unik. Pengrajin batik di Desa Lipursari misalnya, menamakan motif batik khas karya kelompok perempuan purna migran dengan nama 'Batik Manggar Sari' dengan ciri gambar buah dataran tinggi dan warna-warna cerah.

Motif, corak dan warna batik yang timbul dari kekhasan ciri daerah masing-masing ini menjadi *signifier* atau penanda kelompok.

Karena berasal dari Rogojati dan nama kelompok kami *Bumi Sejati*, jadi kami namakan batiknya *Kembangjati*. Motif-motif yang kami buat juga terinspirasi salah satunya dengan bentuk daun jati. (Sartini, Anggota Kelompok Bumi Sejati, Desa Rogojati 2019, wawancara 1 Agustus).

Selain itu, kelompok perempuan purna migran juga aktif melakukan pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas. Pelatihan ini dilakukan dengan memanfaatkan ruang-ruang publik seperti balai desa, yang kerap digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas, produksi, dan diskusi rutin. Selain pelatihan kemampuan produksi seperti menjahit dan membatik, perempuan purna migran juga mendapatkan penguatan kapasitas di bidang pengetahuan keimigrasian dan wawasan tentang migrasi aman. Sebelumnya banyak dari perempuan purna migran masih asing dengan istilah-istilah yang digunakan dalam tata kelola migrasi tenaga kerja di Indonesia.

Kalau manfaat dari aktivitas kelompok itu banyak. Awal mulanya saya tidak tahu tentang migrasi itu apa, TKI itu apa, purna TKI itu apa, dan setelah mengikuti kegiatan tersebut saya jadi mengetahui tentang itu semua. Ternyata pemerintah itu memberikan fasilitas (program) pelatihan untuk purna migran, akan tetapi banyak masyarakat yang belum tahu dan saya beruntung mengikuti itu sehingga saya mengetahui tentang (program-program pemerintah) itu. (Sulimah, Anggota Kelompok MUIWO, Desa Lipursari 2019, wawancara 5 Agustus)

Manfaat yang paling terasa yakni wawasan tentang migrasi aman. Masyarakat lebih peduli terhadap pekerja migran. (Anis Sahidin, Perangkat Desa/Pengurus Desbumi, Desa Sindupaten 2019, wawancara 7 Agustus).

Keberadaan pelatihan dan penguatan kapasitas yang mendorong lahirnya aktivitas bersama, serta proses produksi komoditas yang memunculkan identitas kelompok menjadi beberapa faktor yang mengikat kelompok purna migran perempuan di masing-masing desa.

Ikatan Emosional: Penanganan Kasus dan Aduan

Selain diikat oleh persamaan komitmen, rasa persahabatan, dan pengalaman bersama (*shared experience*), kelompok perempuan purna migran di desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten juga diikat oleh rasa kesamaan nasib yang muncul ketika kelompok perempuan purna migran membuka

posko aduan, dengan tujuan membantu rekan pekerja migran untuk mencari keadilan. Meskipun layanan ini tidak dikembangkan oleh program Desmigratif, dalam praktiknya baik penggerak Desbumi maupun Desmigratif saling berkoordinasi dalam penanganan kasus pekerja migran di daerahnya masing-masing.

Sebenarnya juga ada penanganan kasus sih kalau ada laporan dari—bisa bantu juga sama Desbumi bisa saling koordinasi. (Kiki, Petugas Desmigratif, Desa Rogojati 2019, wawancara 26 November)

Berbagai jenis kasus telah ditangani oleh penggerak Desbumi dan kawan-kawan purna migran di Kabupaten Wonosobo; mulai dari kasus kekerasan domestik, perdagangan manusia, klaim hak-hak kesehatan (asuransi) dan gaji, hilang kontak, hingga permasalahan anak pekerja migran. Proses advokasi yang menyita waktu, tenaga, serta emosi tersebut merekatkan solidaritas kelompok perempuan purna migran; karena tidak jarang mereka harus berbagi peran dalam mendampingi penyintas, keluarga penyintas, maupun menjangkau pihak-pihak eksternal seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Sosial (Dinsos), kepolisian, dan pihak-pihak lainnya.

Cara penanganan kasus yang pertama dilakukan bekerjasama dengan pemdes, pernah menangani kasus yaitu ketika pekerja migran yang sudah pulang ditahan oleh PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dan mau di denda, tetapi dengan adanya Desbumi dan anggota kelompok serta Pemdes bersatu serta pendekatan dengan PPTKIS maka dokumen yang ditahan bisa diambil dari PPTKIS tanpa dikenai denda. (Fitri, Pengurus Kelompok Bumi Karya Mandiri, Desa Kuripan 2019, wawancara 7 Agustus)

Keterlibatan kelompok perempuan purna migran dalam membantu pekerja migran (perempuan) lain, serta ikatan emosional yang hadir dalam proses pendampingan relatif menjadi titik balik bagi kelompok perempuan purna migran yang terlahir dari inisiatif *top down*, untuk mengembangkan kapasitas organik mereka sebagai kelompok berbasis akar rumput yang memiliki kapasitas agensi. Transisi pemahaman atas program - dari *top down* menuju *bottom up* dapat dilihat melalui keseriusan kelompok purna migran perempuan dalam menangani aduan dan mengembangkan koperasi simpan-pinjam, yang dilandasi perasaan kesamaan nasib - bahwa sebagai perempuan yang kerap ditempatkan dalam posisi subordinat, seorang puan harus siap membantu puan yang lainnya.

Paparan di atas menggambarkan bagaimana kelompok perempuan purna migran di empat desa

basis pekerja migran: Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten memiliki kualitas persaudarian yang dimanifestasikan melalui komitmen kolektif, rasa persahabatan, pengalaman bersama, ikatan emosional, dan persamaan nasib - kualitas-kualitas yang relatif identik dengan bentuk persaudarian sebagai ekspresi persahabatan atau *Sisterhood of friendship*. Kelompok perempuan purna migran adalah wadah untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, menemukan jati diri dan membangun identitas kolektif. Persaudarian purna migran di keempat desa di atas juga terlibat dalam gerakan solidaritas, melalui keberadaan posko aduan dan inisiatif koperasi simpan-pinjam yang lahir dari proses kegiatan berkelompok. Hal yang kemudian menarik untuk dibahas adalah apakah persaudarian purna migran di keempat desa tersebut memiliki kualitas *Sisterhood of political solidarity* atau persaudarian sebagai solidaritas politik.

Persaudarian Purna Migran dalam Kontestasi Sumber Daya Desa

Sebagai sebuah kolektif, persaudarian purna migran di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten terlibat aktif dalam kontestasi sumber daya desa. Keterlibatan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks program Desbumi yang lahir dari tujuan untuk memperbaiki kondisi pekerja migran perempuan melalui rekonstruksi tata kelola pemerintahan desa. Namun hal ini tidak lantas menihilkan kapasitas agensi perempuan purna migran. Dalam perkembangannya, perempuan purna migran memiliki inisiatif mandiri untuk melibatkan diri dalam politik desa, untuk memastikan keterwakilan kelompoknya melalui mekanisme formal.

Kontestasi sumber daya yang melibatkan persaudarian purna migran relatif dapat digambarkan melalui dua skenario utama: 1) Kerja-kerja persaudarian dalam merebut anggaran desa; dan 2) Renegosiasi posisi perempuan purna migran dalam konstelasi desa. Pembahasan terkait kontestasi sumber daya dan peran persaudarian purna migran menjadi penting untuk melihat apakah kelompok persaudarian memiliki kualitas yang identik dengan *sisterhood of political solidarity* atau tidak.

Persaudarian Merebut Anggaran Desa

Dalam upayanya untuk memperbaiki kondisi pekerja migran perempuan di wilayah masing-masing, persaudarian purna migran secara konsisten terlibat dalam proses dialog bersama pemerintah desa. Interaksi

antara persaudarian dan pemerintah desa terjalin melalui kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan secara rutin. Salah satu ruang yang paling efektif bagi persaudarian untuk menyuarakan kepentingan mereka adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes); karena selain dihadiri oleh seluruh perangkat desa, dalam Musrembangdes alokasi anggaran desa untuk setiap kelompok kebutuhan ditentukan dan disepakati secara bersama.

Keterlibatan kelompok dalam musyawarah desa yaitu dengan cara kita memberikan saran/masukan. (Ngarifah, Pengurus Kelompok MUIWO, Desa Lipursari 2019, wawancara 5 Agustus)

Kehadiran persaudarian dalam Musrembangdes memicu interaksi antara persaudarian dengan otoritas desa serta elemen masyarakat sipil lainnya - yang kemudian memungkinkan persaudarian untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan; dalam kasus ini, mengakses anggaran desa yang selama ini lebih banyak diakses oleh kelompok-kelompok arus utama. Sebagai contoh, pada tahun 2017 persaudarian purna migran di Desa Rogojati berhasil merebut anggaran desa sebesar Rp 2.000.000,- untuk pemberdayaan kelompok perajin batik. Contoh lainnya adalah capaian persaudarian purna migran di Desa Lipursari yang berhasil mendapatkan anggaran dana desa di tahun 2017 sebesar Rp 500.000,- dan melonjak dua kali lipat di tahun selanjutnya sebesar Rp 1.000.000,- dinamika perebutan anggaran dana desa ini juga dipengaruhi oleh signifikansi intervensi mereka terhadap Pemerintah Desa.

Anggota Desbumi bisa mengikuti musyawarah dalam musyawarah yang diadakan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa bisa menganggarkan untuk kebutuhan Desbumi seperti didirikannya gedung Desbumi atau Desmigratif sebagai tempat untuk memperoleh informasi atau pusat layanan berkaitan dengan pekerja migran Indonesia. (Taslim, Pengurus Desbumi Kuripan 2019, wawancara 1 Agustus)

Namun sayangnya, upaya kontestasi ini sebatas baru dilakukan di tataran desa. Persaudarian purna migran relatif belum terlibat dalam proses Musrembang Kecamatan. Namun fakta bahwa persaudarian mampu mendorong pemerintah desa untuk menganggarkan dana bagi kelompok perempuan purna migran menunjukkan bahwa sebagai sebuah kolektif, persaudarian purna migran berhasil memperjuangkan kepentingan kelompoknya melalui jalur politik formal.

Renegosiasi Posisi Perempuan Purna Migran dalam Konstelasi Desa

Selain kontestasi atas sumber daya material - dalam kasus ini, anggaran desa - persaudarian purna migran juga terlibat dalam kontestasi sumber daya non-material: status sosial. Lahirnya persaudarian purna migran mengubah konstelasi politik di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten. Ranah pengambilan keputusan yang umumnya didominasi oleh laki-laki kini turut menghadirkan kepentingan perempuan di dalamnya.

Dengan adanya Desbumi bekerjasama dengan semua pihak dan pemdes... serta keterlibatan dalam musyawarah desa (atau dalam penyusunan RPJMDes). (Fitri, Pengurus Kelompok Bumi Karya Mandiri, Desa Kuripan 2019, wawancara 7 Agustus)

Setelah dibentuknya Desbumi dan pemerintah desa semakin mengetahui Desbumi sehingga adanya hubungan timbal balik, dalam arti desa semakin dikenal dengan adanya Desbumi oleh pemerintah pusat dan adanya perhatian khusus dari desa ke Desbumi sehingga bisa memberikan kebijakan di desa. (Fitri, Pengurus Kelompok Bumi Karya Mandiri, Desa Kuripan 2019, wawancara 7 Agustus)

Institusi desa yang mayoritas jabatannya didominasi oleh laki-laki mulai melakukan afirmasi terhadap perempuan, dengan melibatkan mereka ke dalam berbagai posisi strategis. Di Desa Rogojati misalnya, kepala desa yang menjabat selama dua periode (dan menjadi penggerak program Desbumi/Desmigratif) adalah perempuan. Selain itu, pada tahun 2019, persaudarian berhasil mendorong keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan mengamankan 3 dari total 5 kursi anggota. Kehadiran anggota BPD perempuan yang merupakan bagian dari persaudarian purna migran mendorong terjadinya renegosiasi atas posisi perempuan dalam skema politik desa; dan keterwakilan perempuan dalam politik desa agaknya menjadi cerminan dari frase 'perempuan memimpin untuk perempuan berdaulat'.

Lebih lanjut, keberhasilan renegosiasi posisi perempuan juga diperjelas dengan munculnya inisiatif pemerintah desa untuk membuat lebih banyak pelatihan bagi kelompok perempuan. Desa turut memfasilitasi persaudarian untuk mengembangkan kapasitasnya, baik secara individu maupun kelompok melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang diusung Kementerian Ketenagakerjaan melalui program Desmigratif di desa-desa basis pekerja migran.

Desa sangat memperhatikan Kelompok. Contohnya memberikan bantuan dan memberi pelatihan menjahit (Ariyati, Pengurus Kelompok Sindupaten 2019, wawancara 3 Agustus).

Kelompok Desbumi mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dari desa ya seperti kita diberi tempat untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sedangkan dari instansi kita mendapatkan peralatan-peralatan produksi seperti oven, kompor. (Ngarifah, Pengurus Kelompok MUIWO, Desa Lipursari 2019, wawancara 5 Agustus).

Berdasarkan paparan di atas, menarik untuk mengkaji lebih lanjut apakah dalam proses perebutan sumber daya desa dan renegosiasi posisi politik perempuan persaudarian purna migran menunjukkan kualitas *sisterhood of political solidarity* atau tidak. Pembahasan terkait topik ini harus berangkat dari pemahaman mendasar terkait dua konsep yang berbeda--konsep yang memiliki kemiripan terminologi, namun definisi konseptual yang berbeda: 1) Solidaritas politik dan 2) Persaudarian sebagai solidaritas politik (*sisterhood of political solidarity*). Jika konsep yang pertama mengacu pada bagaimana kohesi sebuah kelompok sosial berperan dalam proses perebutan kekuasaan, konsep yang kedua mengacu pada bentuk persaudarian yang merayakan perbedaan setiap anggotanya, membuka ruang sebesar-besarnya terhadap konflik dan luapan emosi perempuan, sembari memperjuangkan komitmen untuk mengentaskan diskriminasi gender (Hooks 1984; Tong 2009). Dalam kasus ini, persaudarian purna migran melakukan aktivitas solidaritas politik; melalui pendampingan kasus dan keterwakilan perempuan purna migran dalam politik desa; namun persaudarian purna migran belum menunjukkan kualitas *sisterhood of political solidarity*, yaitu upaya-upaya untuk membuka diri pada konflik dan emosi, serta perayaan atas perbedaan - mengingat persaudarian buruh migran merupakan kelompok yang relatif homogen yang beranggotakan perempuan purna migran.

Lantas, apakah belum hadirnya kualitas persaudarian sebagai solidaritas politik (*sisterhood of political solidarity*) membuat kelompok persaudarian purna migran menjadi 'tidak lengkap' atau 'tidak progresif'? Jawabannya tentu saja tidak. Perbedaan karakteristik solidaritas tidak dapat dimaknai sebagai kategori tertutup maupun kategori berskala ordinal. Bahwa masing-masing persaudarian memiliki karakteristik yang berbeda merupakan sesuatu yang harus dirayakan, dan upaya pengklasifikasian menjadi relevan untuk melihat tantangan, serta peluang persaudarian purna migran ke depannya--tanpa menyisipkan nilai baik-buruk terhadap performa persaudarian.

Persaudarian untuk Masa Depan Purna Migran

Persaudarian memiliki peran penting bagi eksistensi perempuan purna migran di desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten. Selain menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, dan mengembangkan diri, persaudarian juga berperan dalam memajukan posisi perempuan purna migran di wilayahnya masing-masing. Namun keberadaan persaudarian tidak serta-merta dapat dianggap sebagai sesuatu yang terberi. Berbagai tantangan dan hambatan muncul seiring dengan berkembangnya persaudarian purna migran di keempat desa tersebut.

Salah satu masalah utama yang hadir di seluruh kelompok persaudarian purna migran adalah regenerasi. Transisi antara kepengurusan lama ke kepengurusan yang baru kerap memunculkan berbagai masalah, seperti yang dihadapi oleh persaudarian *Migrant United Wonosobo* (MUIWO), Desa Lipursari, yang sempat menghentikan kegiatannya selama beberapa bulan karena ketiadaan kader dan permasalahan internal yang kontraproduktif terhadap keberlangsungan kelompok.

Beberapa bulan ini vakum dan untuk memulainya sangat sulit. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di kelompok sehingga sulit untuk disatukan kembali yaitu harus reorganisasi ulang dan SDMnya kurang untuk menjadi pengurus. (Ummu Rahmah, Pengurus Kelompok MUIWO, Desa Lipursari 2019, wawancara 5 Agustus).

Namun pasca kendala yang dihadapi oleh persaudarian MUIWO, kelompok baru yang telah melewati proses regenerasi dianggap lebih berkomitmen dalam menjalankan tugas-tugas persaudarian. Hal yang relatif sama juga diungkapkan oleh persaudarian Bumi Sejati, Desa Rogojati, yang menyatakan bahwa kepengurusan persaudarian pasca regenerasi dilakukan secara kolektif dan sarat akan nuansa kebersamaan--berbeda dengan kondisi kelompok pre-regenerasi yang cenderung memberikan beban tugas pada satu orang saja.

Kalau untuk perbedaan kelompok yang lama dan yang baru menurut saya kalau kepengurusan yang dulu itu main tunjuk karena waktu dulu yang penting organisasinya terbentuk. Dan kalau kepengurusan sekarang harus ada kesanggupan untuk menjadi pengurus Desbumi tersebut. (Ummu Rahmah, Pengurus Kelompok MUIWO, Desa Lipursari 2019, wawancara 5 Agustus)

Perbedaan antara kepengurusan yang lama dan yang baru menurut saya untuk struktur masih sama, cuma perbedaannya kalo yang dulu saya bekerja sendiri dan untuk yang baru saling bekerja sama. (Sartini, Anggota Kelompok Bumi Sejati, Desa Rogojati 2019, wawancara 1 Agustus)

Hambatan lain datang dari pandangan komunitas terhadap peran perempuan, serta beban domestik yang harus ditanggung oleh perempuan purna migran di keempat desa di atas. Beberapa anggota persaudarian berhenti terlibat dan menghadiri kegiatan persaudarian karena keharusan menyelesaikan urusan domestik seperti mengurus anak. Kondisi ini relatif menunjukkan bagaimana perempuan hanya dapat berpartisipasi di ranah publik apabila 'kewajibannya' di ranah domestik sudah dituntaskan.

Dulu saya sempat berhenti, awal pertemuan berhubung saya punya anak kecil saya berhenti di kegiatan karena repot. (Suratiyah, Anggota Kelompok Bumi Sejati, Desa Rogojati 2019, wawancara 1 Agustus)

Tantangan selama bergabung adalah kita jadi sering ninggal keluarga. (Ngarifah, Pengurus Kelompok MUIWO, Desa Lipursari 2019, wawancara 5 Agustus)

Lebih lanjut, masalah keberlanjutan juga menjadi salah satu hambatan yang hadir dalam perjalanan persaudarian purna migran; mengingat sejarah lahirnya kelompok purna migran yang dilatarbelakangi oleh intervensi program Desbumi/Desmigratif. Upaya untuk mendorong keberlanjutan persaudarian purna migran masih bertumpu pada aspek legal formal melalui kerangka kerja sama desa dengan pihak-pihak yang menginisiasi program.

Ada (landasan legalnya) yakni kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang langsung diberikan kepada Desa Kuripan Watumalang. Ada (juga) MoU dengan Bank BRI sebagai pelaksana program--dari pusat. (Supriyanto, perwakilan Bank BRI Kabupaten Wonosobo 2019, wawancara 6 Agustus)

Walaupun dalam dinamikanya perjalanan Desbumi tidak mudah namun pemerintah desa berkomitmen untuk memperhatikan perkembangannya sehingga terbentuknya Desmigratif karena Desmigratif merupakan manifestasi dari Desbumi dan pemerintah desa adalah pihak yang paling berperan dalam keberlangsungannya Desbumi. (Fitri, Pengurus Kelompok Bumi Karya Mandiri, Desa Kuripan 2019, wawancara 7 Agustus)

Signifikansi suara dan pengaruh kelompok purna migran perempuan juga relatif masih bergantung pada peran aktor kunci dalam kelompok yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat. Mempertimbangkan aspek kaderisasi yang masih lemah, hal-hal ini memicu kekhawatiran besar akan keberlanjutan persaudarian purna migran, serta kualitas organik dari persaudarian purna migran itu sendiri. Namun terlepas dari tantangan dan hambatan yang menghantui persaudarian purna migran di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan

Sindupaten, semangat untuk terus belajar yang tumbuh dalam persaudarian ternyata hadir, dan berkembang menjadi kualitas ketahanan persaudarian dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Tantangan selama bergabung dengan kelompok ya harus selalu percaya diri dan harus selalu belajar apa yang belum pernah kita ketahui dalam lingkup pekerja migran (Sulimah, Anggota Kelompok MUIWO, Desa Lipursari 2019, wawancara 5 Agustus)

Berbicara tentang masa depan persaudarian purna migran, kerangka program Desbumi dan Desmigratif mendorong implementasi diskursus migrasi aman untuk mengurangi dampak kekerasan terhadap pekerja migran, dan menggalang upaya-upaya preventif untuk melindungi hak pekerja migran. Poin yang kurang lebih sama juga tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 target 8.8, yang berbunyi "*melindungi hak-hak pekerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang memiliki pekerjaan tidak tetap*". Diskursus migrasi aman ini tidak sebatas menyoal pendataan dan pemberangkatan pekerja migran melalui mekanisme reguler, tetapi juga menyoal penyelesaian kasus-kasus yang sekiranya dapat menimpa pekerja migran. Keberlanjutan persaudarian, dalam konteks ini, menjadi penting karena mereka merupakan penggerak utama yang mampu mendorong implementasi diskursus migrasi aman di kelompok mereka masing-masing.

Penutup

Kelompok perempuan purna migran yang lahir dari inisiatif *top-down* organisasi masyarakat sipil dan pemerintah ternyata--seiring dengan pasang-surut kelompok--mampu mengembangkan kualitas organik di luar skema organisasi yang relatif kaku. Kelompok perempuan purna migran di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten tidak sekadar menjadi wadah pengembangan diri dan advokasi, tetapi juga manifestasi dari persaudarian antar perempuan purna migran. Karakteristik yang identik dengan *sisterhood of friendship* (atau persaudarian sebagai ekspresi persahabatan) muncul dan mewarnai dinamika kelompok perempuan purna migran. Rasa persahabatan yang lahir dari ruang-ruang perjumpaan antar pekerja migran dimanifestasikan melalui komitmen anggota terhadap kemajuan kelompok; seperti kesediaan untuk hadir secara kolektif dalam forum dan kegiatan kelompok, serta inisiatif pengelolaan dana kelompok--yang dihimpun untuk membantu perempuan purna migran dengan

keterbatasan ekonomi. Melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi oleh program Desbumi/Desmigratif, perempuan purna migran belajar untuk mengenal diri mereka sendiri, dan membangun identitas kolektif melalui motif-motif batik yang unik antara satu desa dengan desa lainnya. Lebih lanjut, perasaan kesamaan nasib dan ikatan emosional turut lahir seiring dengan berjalannya aktivitas kelompok perempuan purna migran--khususnya ketika relawan perempuan purna migran melibatkan diri dalam advokasi kasus kekerasan domestik, perdagangan manusia, permasalahan kesehatan, hilang kontak, hingga problema terkait anak pekerja migran.

Dalam perkembangannya, persaudarian purna migran juga berhasil melakukan negosiasi ulang atas posisi perempuan--khususnya perempuan purna migran--di desanya masing-masing; melalui keterlibatan kelompok dalam mekanisme pengambilan keputusan desa. Persaudarian purna migran secara aktif mendorong pelembagaan perlindungan pekerja migran di desa, mendorong keterlibatan perempuan dalam struktur politik kepengurusan desa, serta mendorong alokasi dana desa untuk kegiatan kelompok--sebuah proses yang berujung pada keberhasilan kelompok 'merebut' dana desa untuk kegiatan pelatihan kelompok migran dan purna migran. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *sisterhood of friendship* mampu mendorong lahirnya aksi-aksi solidaritas yang dapat mengubah struktur kekuasaan desa.

Namun terlepas dari keberhasilan persaudarian purna migran dalam memperbaiki kondisi pekerja migran di desanya masing-masing, kelompok ini menghadapi beberapa tantangan yang berdampak langsung pada keberlanjutan persaudarian. Tersendatnya proses regenerasi anggota dan *gap* antara pengurus baru dan lama menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh persaudarian, di samping beban domestik--yang mengharuskan perempuan untuk menunaikan 'kewajibannya' di ranah domestik, sebelum bekerja di ranah publik--dan berakhirnya pendanaan program di tahun ini. Melihat bagaimana persaudarian mampu melampaui kerangka 'organisasi' dan menghasilkan pola-pola interaksi baru antar perempuan purna migran, penyelesaian tantangan-tantangan di atas melalui jalur 'persaudarian,' seperti pemanfaatan kualitas persahabatan, kelekatkan kelompok berdasarkan persamaan nasib, serta ikatan emosional menjadi skenario yang sangat mungkin dilakukan oleh kelompok; meskipun hingga saat ini, persaudarian masih berkutat dengan masalah-masalah tersebut.

Lebih lanjut, terkait refleksi antara konsep *sisterhood of friendship* dan *sisterhood of political solidarity*, kerangka persaudarian sejatinya dapat dilihat dari sudut pandang yang relatif lebih luas; dengan mengubah fokus persaudarian dari entitas kelompok purna migran menjadi agregat perempuan di desa tertentu, atau Kabupaten Wonosobo, misalnya. Beberapa temuan menunjukkan bahwa selain kelompok perempuan purna migran, terdapat kelompok perempuan lain--seperti kelompok PKK--yang turut hadir dan mengisi ruang kontestasi sumber daya desa. Jika karakteristik persaudarian purna migran identik dengan *sisterhood of friendship*, tidak menutup kemungkinan bahwa di tingkat yang lebih luas, pola-pola interaksi yang identik dengan *sisterhood of political solidarity*, seperti penghargaan atas perbedaan dan pemberian ruang atas konflik dan luapan emosi, hadir dan mewarnai dinamika persaudarian yang melibatkan seluruh kelompok perempuan lintas-kepentingan di level desa/kabupaten. Kesadaran bahwa persaudarian purna migran tidak hadir di ruang hampa menjadi refleksi yang patut digarisbawahi ketika membahas isu ini.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo 2018, Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2018, diakses 12 Agustus 2020, <https://wonosobokab.bps.go.id/publication/2018/08/16/3cafd8c5e6dd6b244b50de65/kabupaten-wonosobo-dalam-angka-2018.html>

Evans, Elizabeth 2015, "The Sisterhood: Inclusivity and Spaces. In: The Politics of Third Wave Feminisms", *Gender and Politics Series*, Palgrave Macmillan, London.

Hidayah, Anis 2018, "Restoring the rights of Indonesian migrant workers through the Village of Care (Desbumi) program", *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty*, h. 225-242.

Hooks, Bell 1984, *Feminist Theory: From Margin to Center*, South End Press, Boston.

Martiany, Dina 2015, "Pemberdayaan Perempuan Desa", *Jurnal Aspirasi*, Vol 6, No. 2.

Migrant CARE 2017, *Laporan Hasil Pendataan DESBUMI*, Pembaruan Data Per-2017, diakses 29 Juli 2020.

Pettman, Jan Jindy 1966, *Worlding Women: A Feminist International Politics*, Routledge, New York.

Tong, Rosemarie 2009, *Feminist thought: a more comprehensive introduction*, Westview Press, Colo.

Wulan, Tyas Retno, et al. 2017, *Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir Melalui Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI): Studi di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*, PPAG Universitas Negeri Jenderal Soedirman.

Yarni, Meri 2014, "Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor II Mei 2014.

Catatan Akhir

- 1 Persaudarian merujuk pada manifestasi kesadaran kolektif perempuan--yang bentuknya sendiri beragam; mulai dari persahabatan karib antar perempuan hingga debat/dialektika antar perempuan. Pada tulisan ini, kata persaudarian mengacu para konsep *sisterhood* yang ditawarkan oleh beberapa pemikir feminis, mulai dari Robin Morgan, Bell Hooks, dan Maria Lugones.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
3. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
4. Yacinta Kurniasih, M.A.(Monash University)
5. Dr. Nur Iman Subono (Universitas Indonesia)
6. Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si. (Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH

JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminism dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>

7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

